

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara merupakan pondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan, dimana pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan segala upaya dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, sebagaimana yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Sitompul & Mardhatillah, 2023). Selain itu, dikutip dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang selaras dengan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, upaya yang dilakukan pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dengan prinsip keterpaduan.

Prinsip keterpaduan dapat diwujudkan melalui koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi terkait. Secara teoritis, ada tiga fungsi utama pemerintah, yaitu: fungsi pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan setiap fungsi tentu saja pemerintah harus memiliki strategi yang strategis untuk mewujudkannya (Andayani, Sitepu, & Maulana, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, pemerintah berkewajiban untuk mengatasi masalah pengangguran dengan merencanakan berbagai kebijakan, strategi, dan

melaksanakan program-program yang dapat menekan angka pengangguran, dimana pengangguran ini merupakan suatu kondisi angkatan usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran juga diartikan sebagai seseorang yang tergolong sebagai angkatan kerja secara aktif mencari upah pada tingkat tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Kondisi pengangguran bukan merupakan masalah yang mencakup bidang ekonomi saja. Melainkan, memiliki hubungan erat yang erat dengan bidang sosial dan pendidikan. Kondisi masyarakat yang menganggur dipengaruhi berbagai faktor lain, mulai dari *skill* yang tidak mumpuni, hingga kondisi lapangan pekerjaan (Sirait et al, 2018).

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki penduduk usia kerja sebanyak 213.99 juta jiwa pada februari 2024. Kemudian, meningkat menjadi 215.37 juta jiwa pada agustus 2024. Dari total angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja pada februari adalah 142.18 juta jiwa, sedangkan pada agustus meningkat menjadi 144.64 juta jiwa. Namun, di sisi lain, jumlah pengangguran juga mengalami kenaikan. Dimana pada februari, terdapat 7.19 juta jiwa yang tergolong dalam pengangguran terbuka, sedangkan pada agustus jumlah ini meningkat menjadi 7.46 juta jiwa. Hal ini, menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia hingga saat ini masih cukup tinggi.

Pengangguran secara nasional ini, tentunya dipengaruhi oleh jumlah pengangguran yang ada pada setiap daerah, baik perkotaan maupun perdesaan (Sitompul & Mardhatillah, 2023). Persoalan ketenagakerjaan bersifat multidimensi, dimana saling mempengaruhi dan dipengaruhi, sehingga memiliki pola hubungan

yang kompleks. Oleh karena itu, penanganannya menuntut dirumuskannya kebijakan dan pendekatan yang menyangkut dimensi secara terpadu. Dimana kegagalan dalam mengatasi pengangguran dapat memicu keresahan sosial yang akan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Sisilia Nurteta et al., 2021). Dalam jangka panjang pemerintah berkewajiban untuk menekan angka pengangguran melalui berbagai upaya, seperti: peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, melakukan pengembangan sektor ekonomi kreatif, melakukan investasi, dan mengembangkan pembangunan infrastruktur (Imanuela Simanjuntak & Tua, 2022).

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi. Provinsi Jambi mencatat angka pengangguran sebesar 4,45% pada februari dan 4,48% pada agustus. Angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 4,82% pada februari dan 4,91% pada agustus. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Jambi berada di posisi menengah ke bawah dalam hal tingkat pengangguran. Kemudian, berdasarkan data hasil proyeksi penduduk tahun 2020-2024, yang menyebabkan jumlah pengangguran di Provinsi Jambi masih menjadi isu kompleks adalah jumlah penduduk yang terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi sebesar 1,33 persen per tahun, sehingga jumlah penduduk secara keseluruhan menjadi 3,7 juta jiwa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur angka pengangguran. Berikut tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi, selama empat tahun terakhir.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Kerinci	2,32	2,63	2,48	2,51
2.	Merangin	4,83	4,69	4,35	4,18
3.	Sarolangun	5,52	5,22	5,09	5,03
4.	Batanghari	4,26	3,53	3,85	4,49
5.	Muaro Jambi	5,59	5,35	5,40	5,27
6.	Tanjung Jabung Timur	1,56	1,32	1,67	2,06
7.	Tanjung Jabung Barat	2,53	2,88	2,95	3,20
8.	Tebo	2,83	1,38	1,71	2,50
9.	Bungo	5,86	5,50	5,23	4,67
10.	Kota Jambi	10,66	8,95	8,27	7,38
11.	Kota Sungai Penuh	3,00	2,49	3,80	4,30
Provinsi Jambi		5,09	5,09	4,59	4,48

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Provinsi Jambi berada di Kota Jambi yang mencapai angka 7,38%. Meskipun, dalam empat tahun terakhir angka pengangguran di Kota Jambi selalu mengalami penurunan. Namun, penelitian mengenai pengangguran di Kota Jambi tetap penting untuk dilakukan. Dikarenakan kondisi penurunan pengangguran tidak selalu mencerminkan perbaikan kondisi lapangan pekerjaan secara keseluruhan. Melainkan, hanya menggambarkan berkurangnya orang yang tercatat sebagai pengangguran, tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan yang diperoleh masyarakat (Helisia Margahana, 2020). Salah satu penyebab angka pengangguran masih menjadi isu di Kota Jambi, dikarenakan Kota Jambi merupakan Ibukota dari

Provinsi Jambi. Dimana pemusatan kegiatan ekonomi di kota menciptakan terjadinya migrasi penduduk desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Situasi ini dalam jangka panjang menyebabkan surplus tenaga kerja yang kronik di kota. Surplus tenaga kerja berarti tingkat pengangguran di kota cenderung tinggi dibandingkan di daerah pedesaan.

Perkembangan penduduk Kota Jambi yang cukup besar merupakan potensi dan dapat diproyeksikan pertumbuhan Kota Jambi menjadi kota bisnis. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan perekonomian Kota Jambi yang berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun ini cukup baik. Selain itu, dilihat dari peranannya dalam perekonomian Provinsi Jambi, maka Kota Jambi memiliki peranan yang cukup strategis. Namun, dengan perkembangan penduduk Kota Jambi yang pesat, maka masalah ketenagakerjaan di Kota Jambi adalah bagaimana pemerintah menciptakan kesempatan kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran sehingga dengan pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, bukan lagi menjadi beban pembangunan melainkan menjadi modal pembangunan.

Tabel 1.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan, dan Kondisi Ketenagakerjaan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
≤SD	38.630	2.731	54,67
SMP	39.763	2.651	51,30
SMA	132.070	12.719	65,59
Perguruan Tinggi	74.854	7.630	81,72
Jumlah	285.317	25.731	64,85

Sumber: Kota Jambi dalam Angka 2024

Berdasarkan data Kota Jambi dalam Angka 2024 bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi pada tahun 2024 mencapai 64,85%, hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk usia kerja aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Namun, angka pengangguran yang masih cukup tinggi, terutama pada kalangan SMA sebanyak 12.719 jiwa dan perguruan tinggi 7.630 jiwa. Mengindikasikan adanya permasalahan secara struktural dalam pasar tenaga kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Namun, hal tersebut tidak menjamin terserapnya lulusan dalam dunia kerja. Selain itu, terjadi kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, ketidakseimbangan distribusi lapangan kerja, serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dalam perencanaan ketenagakerjaan.

Dalam konteks ini, pendekatan *collaborative planning* (perencanaan kolaboratif) sangat relevan untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan pengangguran di Kota Jambi. Dimana teori ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan ini berbagai pihak dapat bekerja sama menyelaraskan kebutuhan pasar kerja, menciptakan peluang usaha, dan mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal. Melalui *collaborative planning*, kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya disusun secara *top-down* oleh pemerintah, tetapi juga melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, perencanaan yang lebih inklusif dan berbasis data dapat

dihasilkan, sehingga strategi pengurangan pengangguran dapat lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Jambi.

Penelitian ini menggunakan 3 referensi relevan yang dijadikan acuan. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama, oleh Mutoharoh & Prastyawan (2024), yang berjudul “Kolaborasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Program Handak Begawi di Kota Bontang” dengan hasil temuan bahwa pelaksanaan kolaborasi dalam pengimplementasian program handak begawi secara keseluruhan baik, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kota Bontang. Sehingga, masih diperlukan peningkatan sosialisasi, kepemimpinan yang lebih baik, dan penguatan proses kolaborasi di masa yang akan datang, agar permasalahan ketenagakerjaan dapat teratasi.

Penelitian kedua, oleh Trianingrum, Cindy Arfidiandra, Adib Tsani, Fardian Anggoma, & Maulana Mubarak (2022), yang berjudul “*Collaborative Governance in CSR: Praktik CSR PT PERTAMINA PATRA NIAGA FT MAOS dalam Program Mernek Jernek*” dengan temuan bahwa Program Mernek Jernek yang merupakan program inisiatif dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga di Desa Mernek, Cilacap tidak hanya menguntungkan perusahaan dari segi reputasi, tetapi juga membawa manfaat langsung kepada masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran di Desa Mernek, Cilacap. Namun, diperlukan kolaborasi yang baik

dari proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Agar tujuan utama yang diharapkan dalam meningkatkan kesejahteraan dapat dicapai.

Terakhir penelitian oleh Harlis & Alexandri (2019) dengan judul “Perbandingan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India dan di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten Sumedang)” dengan hasil temuan bahwa India merupakan negara kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia, disusul Indonesia dengan urutan ketiga. Dengan perbandingan jumlah penduduk yang cukup banyak, masalah pengangguran di India cenderung lebih rendah dibandingkan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India melalui Kebijakan Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional (MGNREGA) merupakan kebijakan inovatif yang dilakukan pemerintah India. Sedangkan di Kabupaten Sumedang Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja mengacu pada tiga pilar utama yakni pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Melalui berbagai program pelatihan dan terselenggaranya kegiatan *Job Fair* yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang belum dapat memberikan dampak yang positif dilihat dari jumlah angka pengangguran di Sumedang yang terbilang masih cukup tinggi dibandingkan India.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan, posisi penelitian ini adalah ingin melihat perspektif baru tentang kajian masalah pengangguran khususnya di Kota Jambi yang berfokus untuk melihat *collaborative planning* yang merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Melalui *collaborative planning* pemerintah bekerja sama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Hal ini sesuai dengan definisi kolaborasi sebagai jaringan atau distribusi informasi, sumberdaya, aktivitas

dan kapabilitas organisasi dalam dua atau lebih sektor untuk bekerjasama mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai jika bekerja sendiri-sendiri yang akhirnya menimbulkan solusi dalam upaya mengatasi masalah pengangguran secara berkelanjutan. Dengan mengangkat judul **“ANALISIS *COLLABORATIVE PLANNING* PEMERINTAH KOTA JAMBI DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang bahwa pengangguran di Kota Jambi masih menjadi permasalahan kompleks yang terjadi hingga saat ini, pemerintah telah melakukan upaya melalui berbagai program terkait ketenagakerjaan untuk mengatasinya, namun belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan: Bagaimana *collaborative planning* yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dalam upaya menurunkan angka pengangguran?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana *collaborative planning* yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dalam upaya menurunkan angka pengangguran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan bagi pihak Pemerintah Kota Jambi, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan mengidentifikasi masalah melalui

perspektif *collaborative planning* sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dalam menanggapi persoalan pengangguran.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu Instansi Pemerintah di Kota Jambi untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja mereka terkait ketenagakerjaan dan melakukan pengembangan strategi yang digunakan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pengangguran. Temuan pada penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bersinggungan dengan ketenagakerjaan, dan masyarakat dalam melihat berbagai permasalahan ketenagakerjaan.

1.5 Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan dari definisi, konsep, dan pernyataan dari variabel-variabel dalam penelitian yang telah direncanakan secara cermat dan metodis. Penciptaan landasan teori yang kuat sangat penting untuk penelitian karena akan berfungsi sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

1.5.1 Governance

Konsep *governance* dielaborasi oleh ilmuwan politik dan administrasi publik untuk menandai cara pandang baru dalam pemerintahan. Dimana melahirkan persepektif institusionalisme baru yang menggeser dari *government* ke *governance*. Secara empirik, pemerintahan versi lama *government* sangat identik dengan kekuasaan, penguasaan, kewenangan, dominasi, pemaksaan, pemusatan, dan lain-lain, dimana pemerintah adalah segala-galanya. Kemudian, pada dekade 1990-an, muncullah istilah *governance* yang mendorong para ilmuwan untuk tidak sekedar memperhatikan pemerintah sebagai lembaga (institusional), melainkan

juga pemerintahan sebagai proses multi arah, yaitu proses pemerintah yang melibatkan pemerintah dengan melibatkan unsur-unsur di luar pemerintah (Tang Abdullah, 2016).

Sementara itu, menurut World Bank dalam (Sujarwoto & Yumarni Tri, 2007) , bahwa terdapat tiga domain dari *governance*, yaitu: *state*, *private sector*, *civil society* yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan (*state*) berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta (*private sector*) menciptakan pekerjaan, dan *civil society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Rhodes (1997) dalam (Sujarwoto & Yumarni Tri, 2007) secara tegas mengatakan bahwa ciri dari *governance* merupakan organisasi *networks* yang di dalamnya ada tuntutan pasar untuk saling bertukar sumber daya. Lebih lanjut diuraikan karakteristik organisasi *networks* dalam teori *governance*, antara lain:

- 1) Interdependensi antara organisasi. Konsep *governance* mencakup lingkup yang lebih luas daripada konsep *government*, yang meliputi aktor-aktor selain pemerintah (*state*), yaitu dengan melibatkan sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat madani (*civil society*).
- 2) Interaksi terus-menerus antar organisasi yang terlibat dalam *networks* dalam rangka pertukaran sumber daya dan negosiasi dalam berbagi sumber daya;
- 3) Interaksi seperti halnya permainan yang diikat dalam kepercayaan dan negosiasi yang ditetapkan dan disetujui oleh masing-masing organisasi; dan

- 4) Tidak ada kewenangan yang mutlak, *networks* mempunyai derajat yang signifikan dengan otonomi setiap organisasi. *Networks* tidak bertanggung jawab langsung (*accountable*) kepada pemerintah (negara) mereka mengatur dirinya sendiri tetapi negara dapat mengaturnya secara tidak langsung.

Governance memberikan pikiran baru dalam formulasi kebijakan dan cara bagaimana kebijakan yang ditetapkan bisa diterapkan dengan tepat sasaran (Ansell & Gash, 2008). Kemudian, menurut *United Nation Development Program* (UNDP), dalam mewujudkan *Good Governace*, ada delapan indikator yang dijadikan acuan, yaitu:

- 1) Partisipasi (*participation*), menilai sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Transparansi (*transparency*), untuk melihat seberapa terbuka informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan publik.
- 3) Penegakan hukum (*rule of law*), mengacu kepada penerapan hukum yang adil dan konsisten, dimana semua individu, institusi, termasuk pemerintah, terikat oleh hukum.
- 4) Daya tanggap (*resposiveness*), mengukur kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif.

- 5) Konsensus (*consensus oriented*), menilai sejauh mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, yang mencerminkan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan.
- 6) Persamaan hak (*equality*), mengacu pada perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam akses terhadap layanan publik dan kesempatan.
- 7) Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and eficiency*), menilai sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pelayanan publik.
- 8) Akuntabilitas (*accountability*), mencakup tanggung jawab pemerintah dan pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka, serta mekanisme untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik.

1.5.2 Collaborative Planning

Collaborative Planning (perencanaan kolaboratif) merupakan sebuah proses pembuatan berbagai keputusan melalui kebijakan, yang melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, kemudian bermusyawarah untuk mencari perbedaan secara konstruktif, sehingga menghasilkan solusi atas sebuah permasalahan (Ely Sufianti, 2021). *Collaborative Planning* (perencanaan kolaboratif) dalam prosesnya berperan untuk menjembati antara masyarakat dan pemerintah, begitupun sebaliknya. Teori *collaborative planning* (perencanaan kolaboratif) memiliki berbagai perspektif dengan struktur yang sangat kompleks. Namun, sebagian besar teori kurang memperhatikan objek perencanaan dan prosesnya, hanya berfokus kepada para perencana dalam membuat rencana.

Kemudian, perdebatan terkini mengenai teori *collaborative planning* (perencanaan kolaboratif) mengikuti gagasan bahwa perencana perlu mengatasi tidak hanya ketidakpastian kognitif tetapi juga konteks perencanaan yang kompleks dan normatif.

“*Collaborative Planning*” dicetuskan oleh Patsy Healey (1997) tentu saja merupakan istilah yang paling umum dan berpengaruh dalam teori perencanaan yang membahas proses perencanaan. Healey mengeluh pada tahun 2003 bahwa "metafora 'perencanaan kolaboratif' mulai digunakan dan disalahgunakan". Kelompok, politisi, dan pembuat kebijakan menggunakan istilah tersebut untuk mempromosikan desain kebijakan partisipatif tertentu. Menurut Healey, perencanaan kolaboratif, menganggap perencanaan sebagai proses tata kelola interaktif, yang dapat terjadi dalam berbagai cara.

Proses dalam perencanaan kolaboratif membutuhkan adanya *leadership* yang fleksibel atau mampu menyesuaikan diri namun tetap memiliki ketegasan. Kemudian, Innes dan Booher (2010) mengembangkan konsep perencanaan kolaboratif sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Dimana proses perencanaan yang efektif tidak hanya bergantung pada keputusan yang diambil oleh para ahli atau pejabat pemerintah, melainkan harus melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya (Ely Sufianti, 2021).

Innes dan Booher (2010), mengemukakan beberapa indikator penting dalam perencanaan kolaboratif, yaitu sebagai berikut:

a) Partisipasi pemangku kepentingan

Partisipasi pemangku kepentingan yang merupakan kondisi awal pada perencanaan kolaboratif akan menjadi indikator yang dapat memfasilitasi ataupun menghambat kerja sama yang akan dilakukan (Bustomi, Ariesmansyah, & Kusdiman, 2022). Partisipasi pemangku kepentingan merupakan elemen kunci dan tahap awal proses *collaborative planning* yang bertujuan mengatasi masalah sosial, dalam konteks ini adalah pengangguran. Partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kolaboratif merupakan hal yang sangat penting dikarenakan kegiatan ini menjadi penentu siapa saja pihak yang terlibat dalam perumusan sebuah kebijakan ataupun program, dengan melihat apa saja kepentingannya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi, yaitu:

- 1) Komitmen dan kesediaan untuk berkolaborasi, akan menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang kuat antara pemangku kepentingan, dimana setiap pihak harus memiliki visi dan kemauan yang sama untuk bekerja sama demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Transparansi dan akses informasi yang terbuka, akan meningkatkan kepercayaan serta memperlancar proses komunikasi antarpihak yang

terlibat, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

- 3) Kapabilitas dan sumber daya, dimana setiap pemangku kepentingan perlu memiliki kompetensi, keahlian, serta sumber daya yang cukup untuk menjalankan perannya dengan baik, baik dalam bentuk tenaga kerja, anggaran, maupun infrastruktur pendukung (Ansell & Gash, 2008).

Collaborative planning bukan hanya sekedar membentuk forum diskusi dengan melibatkan pemangku kepentingan, namun menciptakan proses pengambilan keputusan bersama yang efektif dan inklusif. Untuk keberhasilan jangka panjang, penting membangun kepercayaan, menyamakan tujuan, dan menciptakan struktur yang adil bagi semua aktor yang terlibat.

b) Dialog Terbuka

Dialog terbuka merupakan proses identifikasi potensi dan masalah yang dibahas secara bersama-sama antar pihak yang terlibat dalam merumuskan kebijakan ataupun program yang diupayakan dalam mengatasi sebuah permasalahan. Tahapan membangun kepercayaan dalam proses kolaboratif merupakan upaya saling menaruh kepercayaan antar stakeholders, tidak hanya semata-mata untuk keperluan negoisasi. Tetapi, membangun rasa percaya perlu dilakukan ketika proses kolaborasi dimulai (Bustomi et al., 2022).

Dialog terbuka yang difasilitasi secara setara dan transparan sangat penting dalam menciptakan pertukaran informasi, pengalaman, serta aspirasi dari berbagai

pihak, termasuk mereka yang terdampak langsung oleh pengangguran. Melalui dialog ini, dapat dibangun pemahaman bersama mengenai akar penyebab pengangguran, hambatan struktural yang ada, serta potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan. Proses ini mendukung pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Dalam kerangka *collaborative planning*, dialog tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan, komitmen bersama, dan rasa memiliki (*ownership*) terhadap strategi yang dirumuskan (Sujarwoto & Yumarni Tri, 2007). Keterlibatan sektor industri sangat penting dalam mengidentifikasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja yang menyebabkan *missmatch* di pasar kerja, sementara lembaga pendidikan dapat berperan dalam merancang program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Dengan demikian, dialog terbuka berperan dalam memperkuat kualitas perencanaan serta meningkatkan peluang keberhasilan implementasi kebijakan pengentasan pengangguran secara berkelanjutan.

Prinsip-prinsip dasar dari dialog terbuka harus mencakup saling menghargai, kesediaan untuk mendengarkan secara aktif, serta keterbukaan terhadap perbedaan perspektif. Dialog ini juga harus difasilitasi secara adil dan netral agar tidak ada pihak yang mendominasi, baik itu yang lebih kuat secara politik, ekonomi, atau institusional. Agar lebih efektif, dialog terbuka harus berbasis pada data dan informasi yang transparan, sehingga semua peserta dapat membangun pemahaman yang sama terhadap isu yang dibahas, seperti tingkat

pengangguran, tantangan di dunia kerja, serta solusi yang dapat diterapkan. Proses ini juga sebaiknya melibatkan masukan dari pencari kerja, pelaku industri, dan lembaga pelatihan, serta dilengkapi dengan mekanisme umpan balik dua arah dan dokumentasi hasil diskusi yang dapat dijadikan acuan dalam tahapan perencanaan dan implementasi berikutnya. Dengan demikian, dialog terbuka dalam *collaborative planning* tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga sebuah wahana untuk membangun kepercayaan, memperkuat legitimasi keputusan, dan mendorong komitmen jangka panjang dalam penyelesaian isu pengangguran secara kolaboratif.

c) Setting persetujuan dan komitmen

Setting persetujuan dan komitmen dalam konteks perencanaan kolaboratif, merujuk pada tahapan di mana semua pihak yang terlibat dalam perencanaan bersama menyetujui rencana atau keputusan tertentu, dan kemudian berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Setting persetujuan dan komitmen merupakan strategi manajemen yang tidak hanya fokus pada saat ini, tapi juga kerja sama akan datang. Proses ini mempunyai niatan yang sama untuk mengambil kebijakan terbaik dari berbagai pihak dan berkaitan dengan bagaimana langkah yang diambil dalam membangun komitmen diantara berbagai pihak (Napitupulu & Muhyidin, 2021).

Comitment to Process merupakan komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Saling berbagi komitmen, berarti berbagai pihak saling tergantung satu

sama lain untuk mengatasi permasalahan dan menciptakan solusi dalam sebuah permasalahan, bahwa proses ini merupakan milik bersama, dan saling terbuka untuk mendapatkan manfaat bersama. Sedangkan *Share understanding* atau pemahaman bersama adalah mengetahui aturan, tujuan, dan batasan pengerjaan tugas dan peran masing-masing.

Dalam proses perencanaan kolaboratif, setting persetujuan dan komitmen merupakan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan implementasi rencana yang telah disusun bersama. Tahapan ini menandai transisi dari diskusi dan perumusan gagasan menuju kesediaan para pemangku kepentingan untuk secara aktif mendukung dan melaksanakan hasil perencanaan. Terdapat beberapa indikator utama yang mencerminkan keberhasilan tahap ini, yaitu:

1) Kesepahaman Bersama atas Masalah dan Tujuan

Indikator pertama adalah tercapainya kesepahaman bersama mengenai definisi masalah utama, akar penyebabnya, serta tujuan yang ingin dicapai oleh semua pihak yang terlibat. Kesepahaman ini merupakan fondasi bagi terbentuknya komitmen karena menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memiliki persepsi dan orientasi yang selaras terhadap isu yang dihadapi, misalnya masalah pengangguran. Kesepahaman ini biasanya tertuang dalam dokumen rencana bersama, hasil forum diskusi, atau pernyataan bersama yang disepakati secara kolektif.

2) Proses Negosiasi dan Konsensus

Ciri utama *collaborative planning* adalah pengambilan keputusan yang bersifat deliberatif. Oleh karena itu, indikator kedua adalah adanya **proses** negosiasi terbuka yang menghasilkan konsensus atau kompromi. Proses ini menunjukkan bahwa keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui dialog yang melibatkan semua pihak secara aktif dan setara. Dalam konteks pengangguran, misalnya, proses ini bisa melibatkan diskusi antara pemerintah, sektor industri, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan solusi yang saling menguntungkan.

3) Dukungan Formal dan Komitmen Institusional

Komitmen yang telah disepakati perlu diwujudkan dalam bentuk dukungan formal, seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama, atau komitmen publik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak tidak hanya menyetujui secara lisan, tetapi juga menyatakan tanggung jawabnya secara institusional. Dukungan ini juga penting sebagai dasar legitimasi untuk melanjutkan ke tahap implementasi.

d) Implementasi dan pencapaian hasil

Implementasi dalam proses *collaborative planning* (perencanaan kolaboratif) merupakan tahap pelaksanaan rencana yang telah disusun bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Pada tahap ini, strategi yang telah dirancang mulai dijalankan dengan koordinasi yang erat antara pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan yang disepakati (Chalvin L Huki, Et.al, 2024).

Implementasi dalam proses *collaborative planning* merupakan tahapan krusial yang berfokus pada pelaksanaan rencana yang telah disusun secara partisipatif oleh berbagai pemangku kepentingan. Berbeda dengan pendekatan perencanaan konvensional yang bersifat *top-down*, implementasi dalam perencanaan kolaboratif dilakukan secara inklusif dan terdesentralisasi, di mana setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang disepakati secara kolektif. Proses ini diawali dengan penugasan peran yang jelas bagi masing-masing pihak, disertai mobilisasi sumber daya baik dari sisi keuangan, tenaga, maupun kapasitas teknis. Selanjutnya, pelaksanaan program berjalan berdasarkan rencana aksi bersama yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan, dengan tahapan waktu, indikator keberhasilan, dan mekanisme koordinasi yang disepakati bersama.

Selama proses implementasi berlangsung, dibentuk mekanisme pemantauan dan evaluasi partisipatif untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai tujuan, serta memungkinkan penyesuaian kebijakan berdasarkan dinamika di lapangan. Karakteristik penting dari implementasi kolaboratif adalah fleksibilitas dan adaptivitasnya, yang memungkinkan berbagai pihak menyesuaikan strategi pelaksanaan sesuai kondisi sosial ekonomi yang berkembang. Dalam konteks permasalahan pengangguran, implementasi *collaborative planning* dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, sektor industri, lembaga pelatihan, dan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan program pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. Pemerintah dapat menyediakan data dan infrastruktur, industri memberikan input keterampilan yang dibutuhkan,

lembaga pelatihan menyusun kurikulum, dan masyarakat sipil memfasilitasi akses bagi kelompok rentan.

Dengan koordinasi yang baik dan tanggung jawab yang dibagi secara adil, implementasi kolaboratif tidak hanya menjamin efisiensi pelaksanaan program, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan intervensi. Oleh karena itu, dalam kerangka *collaborative planning*, implementasi bukan hanya kegiatan teknis, melainkan wujud nyata dari komitmen kolektif para pihak dalam menyelesaikan masalah publik secara bersama-sama dan berkelanjutan.

e) Evaluasi

Evaluasi dalam *collaborative planning* (perencanaan kolaboratif) merupakan proses reflektif dan partisipatif yang berlangsung sepanjang siklus perencanaan, bukan sekadar penilaian akhir terhadap keberhasilan suatu rencana. Dimana evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Aspek utama yang dinilai mencakup keterlibatan stakeholder, transparansi, komunikasi, serta kesepakatan bersama. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan agar keputusan yang diambil lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan (Cide, 2017).

Beberapa tujuan utama evaluasi dalam *collaborative planning*, yaitu:

- 1) Menilai sejauh mana pencapaian tujuan bersama dan apakah strategi yang dirancang telah menghasilkan perubahan sesuai yang diharapkan;
- 2) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proses, termasuk efektivitas partisipasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama;

- 3) Meningkatkan kualitas kebijakan, dimana hasil evaluasi menjadi masukan penting untuk perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang; serta
- 4) Membangun akuntabilitas dan transparansi, hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara bertanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat.

Evaluasi bukan hanya sekedar tahap akhir dari *collaborative planning*, tetapi merupakan bagian penting dari siklus perencanaan yang berkelanjutan. Evaluasi memungkinkan terjadinya pembelajaran bersama, perbaikan berkelanjutan, serta peningkatan efektivitas dan legitimasi dari kebijakan publik yang dihasilkan melalui proses kolaboratif.

1.5.3 Pengangguran

a) Pengertian Pengangguran

Pengangguran dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional yaitu seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Sedangkan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, yang disebut pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha ataupun penduduk yang sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (1994) pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan, tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang bekerja, namun tidak bekerja secara aktif

tergolong pengangguran (Agung Nurrahman, 2023). Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*)

Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

2) Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)

- a) Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
- b) Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

b) Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja ataupun tidak bekerja dengan optimal. Berdasarkan pengertian tersebut maka pengangguran dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Pengangguran terselubung (*Disquised Unemployment*), adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan, seperti sakit, hamil, ataupun difabel.
- 2) Setengah menganggur (*Under Unemployment*), adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

- 3) Pengangguran terbuka (*Open Unemployment*), adalah tenaga kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan (Yuniar Sri Hartanti, 2021).

Kemudian, menurut Sukirno (2010), pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan penyebabnya, antara lain:

- 1) Pengangguran friksional, yaitu para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.
- 2) Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah, umumnya pengangguran ini terjadi sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar.
- 3) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi.
- 4) Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia dengan mesin-mesin dan bahan kimia (Kasim et al., 2021).

c) Penyebab Pengangguran

Pengangguran terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Menurut Mahdar (2015) faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran, yaitu sebagai berikut:

- 1) Angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia.
- 2) Struktur lapangan pekerjaan yang tidak seimbang.

- 3) Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik yang tidak seimbang.
- 4) Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja.
- 5) Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah yang tidak seimbang (Kasim et al., 2021).

d) Dampak Pengangguran

Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat dimana, jika tingkat pertumbuhan ekonomi menurun maka tingkat kesejahteraan masyarakat ikut menurun. Beberapa dampak pengangguran, yaitu sebagai berikut:

1) Ditinjau dari segi ekonomi

Pengangguran cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah karena mereka memiliki pendapatan yang lebih sedikit atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali. Sehingga, menyebabkan berkurangnya kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini, berdampak dan menghambat pertumbuhan konsumsi, yang merupakan salah satu pendorong penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam negara.

2) Ditinjau dari segi sosial dan keamanan

Pengangguran memiliki dampak yang signifikan dari segi sosial dan keamanan. Hal ini dikarenakan, banyaknya pengangguran dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen, dan dapat mempengaruhi terhadap tingginya tingkat kriminalitas. Pemerintah dan

lembaga terkait sering mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak sosial dan keamanan dari pengangguran, seperti menyediakan program jaring pengaman sosial, pelatihan keterampilan, bantuan pencarian kerja, dan bantuan kesejahteraan.

3) Ditinjau dari segi mental

Pengangguran dapat memiliki dampak yang signifikan dari segi kesejahteraan mental individu. Dalam beberapa kasus, pengangguran yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesejahteraan mental yang serius. Banyaknya, pengangguran akan menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan diri, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi (Nur Baeti, 2013).

1.6 Definisi Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alat yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dengan memahami definisi dan fungsi dari sebuah teori, kita dapat melakukan penelitian dengan baik sehingga menghasilkan temuan yang lebih bermakna. Maka dari itu, definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan secara aktif, selain itu pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya kriminalitas, dan masalah masalah sosial lainnya. Maka dari itu, diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran ini.
- 2) Teori *Governance* merujuk kepada konsep yang lebih luas dari pada sekedar pemerintahan (*government*) dimana, mencakup seluruh mekanisme,

proses, dan lembaga untuk memenuhi kewajiban dan menentukan keputusan demi mencapai kesejahteraan bersama.

1.7 Definisi Operasional

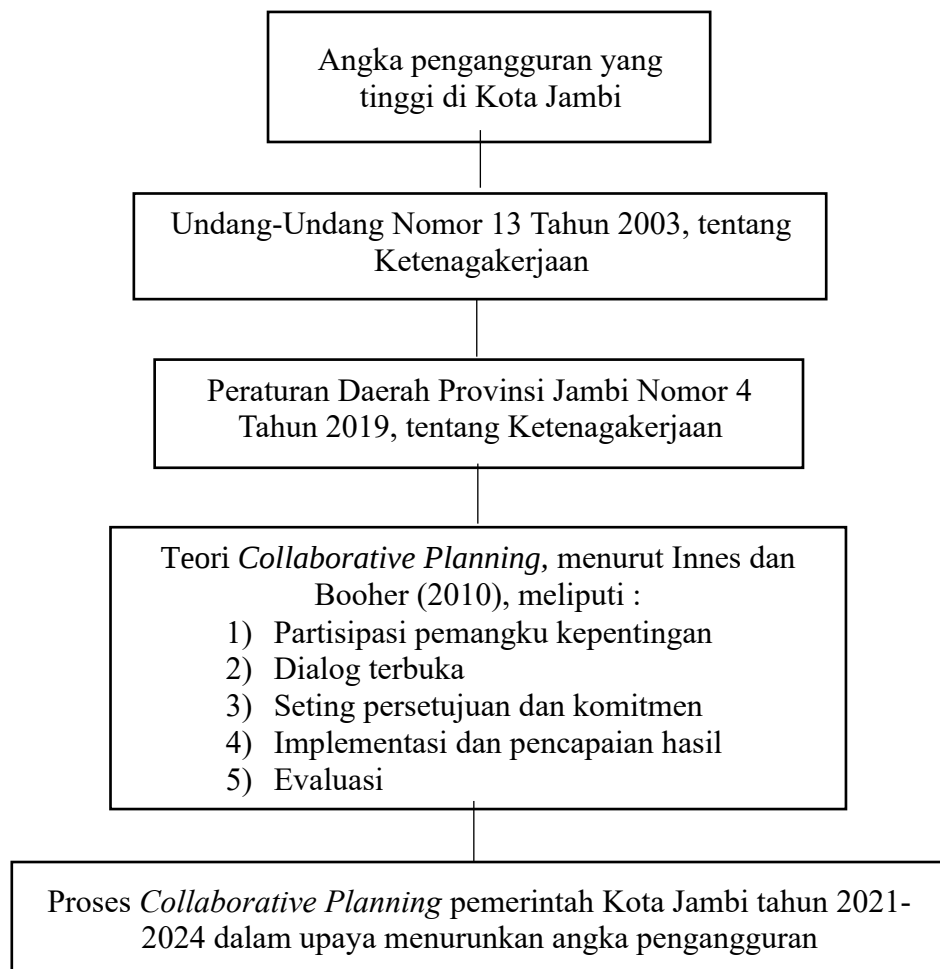
Definisi operasional membantu peneliti dalam memastikan penelitian yang dilakukan apakah telah berjalan secara sistematis, terstruktur, serta memberikan peta yang jelas bagi peneliti hingga akhir penelitian. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan Teori *Collaborative Planning* oleh Innes dan Booher (2010), dengan beberapa indikator yang meliputi :

- 1) Partisipasi pemangku kepentingan, merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam proses perencanaan kolaborasi, untuk melihat siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan kolaboratif dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Jambi.
- 2) Dialog terbuka, merupakan proses dialog yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam menemukan solusi atas sebuah permasalahan, dalam konteks ini adalah masalah pengangguran di Kota Jambi.
- 3) Setting persetujuan dan komitmen, berkaitan dengan bagaimana langkah yang diambil dalam membangun komitmen diantara berbagai pihak terhadap perencanaan yang telah disusun dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Jambi.
- 4) Implementasi dan pencapaian hasil, berkaitan dengan bagaimana proses jalannya sebuah kebijakan yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Kota Jambi.

- 5) Evaluasi, berkaitan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses *collaborative planning* dalam mengatasi masalah pengangguran, dimana melihat apakah ada kendala-kendala yang menunjukkan hasil perbaikan atau tidak, sampai tujuan dalam mengatasi pengangguran dapat dicapai.

1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



Sumber: Dikelola oleh Penulis 2024

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, angka pengangguran di Kota Jambi tinggi, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2019, tentang Ketenagakerjaan pemerintah berkewajiban untuk mengatasi masalah pengangguran dengan merencanakan berbagai kebijakan, strategi, dan melaksanakan program program yang dapat menekan angka pengangguran. Kemudian, penelitian ini ditujukan untuk melihat sejauh mana keterlibatan yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dalam upaya menurunkan angka pengangguran, menggunakan Teori *Collaborative Planning* oleh Innes dan Booher (2010).

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya diartikan sebagai suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data yang dipergunakan dengan tujuan tertentu.

1.9.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan tata cara yang digunakan oleh seseorang dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari isu-isu yang kompleks. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisis proses berpikir yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang dikaji dan selalu menggunakan logika ilmiah. Peneliti atau individu yang memiliki minat ilmiah mengumpulkan data dalam konteks ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah, maka David Williams menyebut ini sebagai penelitian kualitatif (Prastowo, 2014). Tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk menafsirkan isu, fenomena, atau gejala

sosial dengan cara penjabaran terhadap gambaran isu, fenomena, atau gejala sosial yang terjadi ke dalam rumpunan kata sehingga akan timbul sebuah teori (Sujawerni, 2015).

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus. Creswell menjelaskan bahwa penelitian studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang menginvestigasi sistem yang terbatas secara kontemporer (kasus tunggal) atau berbagai kasus. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data rinci dari berbagai sumber informasi atau sumber informasi majemuk, yang kemudian digunakan untuk memberikan deskripsi dan mengidentifikasi tema yang muncul dari kasus tersebut (Cresswell, 2015). Penelitian ini memilih metode studi kasus untuk mendalami upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dalam menurunkan angka pengangguran menggunakan persepektif kolaboratif.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditentukan oleh peneliti sendiri dimana peneliti mengambil lokasi penelitian pada kawasan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi. Lokasi tersebut dipilih karena Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM merupakan fasilitator masalah ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM menjadi lokasi utama dalam penelitian ini, dimana alamat tepatnya berada pada Jalan Kapten Pattimura Komplek Transito, Kel. Alam Barajo, Kota Jambi.

1.9.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penting untuk dilakukan agar sebuah penelitian dapat terpusat terhadap suatu permasalahan dan membantu membatasi ruang lingkup sebuah penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana proses *collaborative planning* pemerintah Kota Jambi dalam upaya menurunkan angka pengangguran di Kota Jambi. Maka penelitian ini, sejauh mana kebijakan pemerintah Kota Jambi melalui *collaborative planning* dalam menurunkan angka pengangguran.

1.9.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Bentuk dari data kualitatif diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu: observasi (non-partisipan ke partisipan), wawancara (terbuka hingga tertutup), dokumen (privat ke publik) dan sumber-sumber audio visual (seperti; gambar, CD, dan lain-lain). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer diperoleh dari informan secara langsung melalui wawancara. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah melalui wawancara bersama pihak-pihak terkait yang dapat memberikan data, informasi, ataupun jawaban yang jelas. Pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, antara lain: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Jambi, Balai Latihan Kerja dan Produktivitas

Provinsi Jambi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi, Dinas Pendidikan Kota Jambi, dan Masyarakat Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mengacu kepada informasi yang sudah tersedia dan siap digunakan dalam berbagai format. Data dalam penelitian ini ditemukan disumber-sumber seperti buku, literatur, sumber perpustakaan dan studi sebelumnya Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen terkait Ketenagakerjaan.

1.9.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan narasumber atau informan menggunakan *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan pemilihan sampel secara sengaja oleh Patton (2002). Peneliti memilih kasus atau narasumber yang kaya akan informasi (*information-rich cases*) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jumlah narasumber yang dipilih bergantung pada tujuan penelitian serta sumber daya yang tersedia. Informan penelitian diartikan sebagai orang yang dapat memberikan informasi terhadap bagaimana situasi maupun kondisi dari latar belakang penelitian yang dilakukan. Selain itu, informan harus memang benar- benar mengetahui terkait penelitian yang dilakukan. Kemudian, teknik

Kemudian, *Snowball Sampling* merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar

sociogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus Neuman (2003). Dimana, peneliti tidak menutup kemungkinan apabila terdapat narasumber lain yang memiliki hubungan selama proses penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menganalisis masalah, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang dilakukan antara dua orang untuk berbagi informasi dan dapat diinterpretasikan berkaitan dengan suatu topik tertentu. Kemudian, menurut Zuriah dalam Feny Rita Fiantika et al. (2022) wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan dan direspon secara lisan. Dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan baik telah disusun maupun secara langsung kepada seseorang untuk dimintai informasi terkait permasalahan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang dilakukan, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*). *In-depth interview* atau wawancara mendalam merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan tatap muka antara pewawancara dan informan, yang

bertujuan memperoleh informasi secara mendalam dan bermakna tentang suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan secara *face to face* (tatap muka) atau melalui cara lainnya seperti telepon dengan responden. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang peristiwa masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Berikut beberapa narasumber yang akan diwawancara:

Tabel 1.3 Informan

NO	Narasumber
1.	Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional, Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi.
2.	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Provinsi Jambi.
3.	Perencana Ahli Muda, Penelitian dan Pengembangan, BAPPEDA Kota Jambi.
4.	Plt Kepala Bidang Pembinaan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
5.	Masyarakat Pencari Kerja.
6.	Masyarakat Pemilik UMKM.

Sumber: Dikelola oleh Penulis

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada topik penelitian. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi, seperti mencari makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menemukan lebih banyak detail dan memperkuat kesimpulan dan pembahasan. Dokumen seperti buku harian seseorang, otobiografi, surat-surat dan catatan pribadi lainnya serta catatan resmi seperti memo, catatan catatan persidangan, korespondensi, dokumen kebijakan, proposal, arsip, hasil statistic dan lain sebagainya, dapat

digunakan sebagai sumber informasi. Foto juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan data.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong dalam bukunya berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*, analisis data adalah kegiatan menelaah hasil penelitian meliputi proses menelaah seluruh data dari instrumen penelitian seperti catatan, dokumen, rekaman, dan lain-lain. Sedangkan menurut Taylor, analisis data adalah proses yang digunakan untuk menentukan tema dan juga merumuskan hipotesis. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif diperkenalkan oleh Miles dan Huberman dalam Yuniar Sri Hartanti (2021). Terdapat tiga alur model analisis data kualitatif yakni:

1. Reduksi Data

Mengingat banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan, sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin banyak waktu dihabiskan oleh seorang peneliti di lapangan, maka jumlah data yang diperlukan akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi paling penting, memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk memperoleh data selanjutnya. Reduksi data dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan seperti komputer, notebook dan lain sebagainya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, ketika melakukan penelitian, peneliti harus memperhatikan secara seksama apa saja yang dianggap aneh atau asing atau tidak memiliki pola.

2. Penyajian Data (Display Data)

Menyajikan data adalah langkah berikutnya setelah data tersebut direduksi. Pada penelitian kualitatif, data disajikan dengan menggunakan berbagai format seperti bagan, deskripsi singkat dan korelasi antar kategori. Menurut Miles dan Huberman, pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dengan teks bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka dapat mempermudah dan memahami apa yang terjadi. Selain itu, Miles dan Huberman mengusulkan agar data dapat ditampilkan dengan menggunakan grafik, matriks, *network* (jejaring kerja), dan chart selain dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat dimodifikasi jika tidak ditemukan bukti substansial yang dapat mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, temuan pada tahap awal dianggap dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang dapat diandalkan dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut.

1.9.8 Keabsahan Data

Menurut Creswell (2015) keabsahan data dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk mengevaluasi kebenaran dari berbagai temuan yang dipresentasikan oleh peneliti dan partisipan. Sudut pandang ini juga menyiratkan bahwa setiap laporan penelitian merupakan presentasi dari peneliti. Peneliti dapat menggunakan triangulasi sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk menentukan kredibilitas data yang telah mereka kumpulkan. Dengan kata lain, triangulasi mengacu pada proses verifikasi keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sedangkan menurut Bachri (2010) triangulasi merupakan metode pengujian data dengan melakukan pengecekan dan perbandingan data dengan menggunakan sesuatu di luar data itu sendiri. Jadi, keabsahan atau triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran data dengan menggunakan berbagai metode.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yakni mengecek kebenaran data atau informasi dengan menggunakan berbagai jenis teknik pengumpulan dan sumber data seperti wawancara, arsip, dokumentasi, dan dokumen pendukung lainnya.